

**Laporan Kegiatan Analisis Data  
Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama  
atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas  
Tahun 2021**



[This Photo](#) by Unknown Author is licensed under [CC BY-SA](#)

**Falio Hardi**  
**Deputi Bidang Akuntan Negara**  
**NIP 19900102 201210 1 001**

## RINGKASAN MATERI

Pemeriksaan bersama yang dilakukan oleh DJP, BPKP, dan SKK Migas diharapkan dapat menjaga penerimaan negara serta memberikan kepastian hukum bagi KKKS, sehingga dapat mendorong investasi industri hulu minyak dan gas bumi. Dengan adanya pemeriksaan bersama, maka prinsip *uniformity* dapat dipenuhi yaitu biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan adalah sama dengan biaya yang dikembalikan kepada kontraktor serta merupakan biaya yang menjadi dasar dalam penghitungan bagi hasil dan PPh Migas.

Peneliti mencoba mengimplementasikan hasil diklat *Data Analytic For Audit* ke dalam topik pengawasan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas dengan fokus analisis pada temuan pemeriksaan bersama tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif atas temuan. Hasil analisis data dalam laporan ini diharapkan bermanfaat dalam kegiatan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas yang akan dilakukan oleh Satgas Pemeriksaan Bersama.

## **BAB I**

### **Data Umum Obyek Pengawasan**

#### **a. Gambaran Umum Topik Pengawasan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan perubahannya, pemeriksaan dilakukan bersama oleh tiga instansi; Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), yang selanjutnya disebut sebagai Satuan Tugas Pemeriksaan Bersama (“Satgas Pemeriksaan Bersama”).

Pemeriksaan Bersama adalah serangkaian kegiatan mencari, menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan Satgas Pemeriksaan Bersama secara objektif dan profesional terhadap Kontraktor yang bertindak sebagai operator atas pelaksanaan Kontrak Kerja Sama berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan pengembalian Biaya Operasi di bidang usaha hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan Bersama dilakukan atas pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03/2018 dan perubahannya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Berbentuk Kontrak Bagi Hasil dengan Pengembalian Biaya Operasi di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

#### **b. Identitas Obyek Pengawasan**

Obyek pengawasan merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). KKKS adalah badan usaha atau bentuk usaha tetap yang diberikan wewenang untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan SKK Migas.

c. Matriks Desain Pengawasan

Matriks desain pengawasan pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerja sama dapat dilihat pada table di bawah ini:

No	Pertanyaan Audit	Informasi Dibutuhkan dan Sumber	Metode Analisis Dipergunakan	Prakiraan Hasil
1	Apakah pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh migas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan?	Pemenuhan persentase bagi hasil antara KKKS dengan pemerintah  Sumber:PSC, FQR, G/L Daftar kontrak PBJ	Analisis Deskriptif Analisis Perbandingan	Simpulan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas
2	Apakah terdapat indikasi penyimpangan atau ketidaksesuaian dengan ketentuan?	Risiko penyimpangan yang mungkin terjadi  Sumber: Daftar Kontrak PBJ, Invoice dan bukti pendukung atas transaksi pada G/L,	Analisis Deskriptif Analisis Perbandingan	Daftar temuan hasil pemeriksaan bersama
		Status temuan pada pemeriksaan sebelumnya sebagai bahan tahap persiapan pemeriksaan bersama  Sumber: Daftar temuan dari pemeriksaan bersama tahun sebelumnya	Analisis Deskriptif	Dashboard temuan hasil pemeriksaan bersama

Analisis data dalam kegiatan ini difokuskan pada pertanyaan audit nomor 2, di mana dalam rangka mendeteksi penyimpangan yang mungkin terjadi secara maksimal, maka perlu dilakukan analisis terhadap temuan pemeriksaan bersama tahun-tahun sebelumnya, kegiatan analisis data ini akan menganalisis temuan hasil pemeriksaan bersama tahun 2021.

## BAB II

### Kegiatan Analisis Data

#### a. Kegiatan Analisis Data

Kegiatan analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

##### 1. *Data Extraction and Transform*

Tahap ini merupakan tahapan memperoleh data temuan atas pengawasan yang dilaksanakan pada tahun 2021 dari SKK MIGAS. Setelah data diperoleh, dilakukan pembersihan (*cleansing*) dan penataan data agar format dataset sesuai dengan yang dibutuhkan. Berbagai kelemahan data seperti ketidaksesuaian *format field* data atau lainnya di-*transform* hingga sesuai dengan kebutuhan saat analisis.

##### 2. *Analysis*

Tahap ini merupakan tahapan pembuatan model analisis yang dibutuhkan. Model analisis yang dilakukan adalah analisis deskriptif.

##### 3. *Report*

Pelaporan hasil analisis dituangkan dalam bentuk *Dashboard* Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrrak Kerja Sama Tahun 2021.

#### b. Uraian Analisis Data dan Hasilnya

##### 1. Analisis Data

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang sudah dilakukan ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

a) Total jumlah nilai temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Tahun 2021 terhadap 30 KKKS dengan 458 jumlah temuan dan 7 jumlah kelompok temuan adalah sebesar Rp5.149.286.308.229,24.

b) Status temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Tahun 2021 yang Perlu Pembahasan Lebih Lanjut sebesar Rp5.000.322.436.672,24 atau 97,11%, Setuju Sudah Dikoreksi sebesar Rp 136.424.085.980,00 atau 2,65%, dan Setuju Belum Dikoreksi sebesar Rp12.539.785.577,00 atau 0,24%.

c) Temuan berdasarkan kelompok temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1) *Cost Recovery*

- Tidak sesuai dengan PSC, Perppu/PTK/Pesetujuan SKK MIGAS, Kepmenakertrans, dan Ketentuan Lainnya sebanyak 310 temuan;
- Tidak sesuai dengan Kontrak Kerja sebanyak 106 temuan; dan
- Lainnya sebanyak 34 temuan.

2) Penyetoran

- *Investment credit* sebanyak 3 temuan;
- Kurang setor PPh/PPs dan PBDR sebanyak 2 temuan;
- *Overlifting* belum disetor sebanyak 2 temuan; dan
- Penyetoran lain sebanyak 1 temuan.

d) Temuan berdasarkan nilai temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1) *Cost Recovery*

- Tidak sesuai dengan PSC, Peraturan Perundang-Undangan/Ketentuan PTK/Pesetujuan SKK MIGAS, Kepmenakertrans, dan Ketentuan Lainnya sebesar Rp3.299.442.883.636,74;
- Lainnya sebesar Rp 943.141.586.949,50; dan
- Tidak sesuai dengan Kontrak Kerja sebesar Rp544.783.608.103,00.

2) Penyetoran

- *Investment credit* sebesar Rp145.669.979.980,00;
- *Overlifting* belum disetor sebesar Rp136.097.693.900,00;
- Kurang setor PPh/PPs dan PBDR sebesar Rp80.131.565.360,00; dan
- Penyetoran lain sebesar Rp18.990.300,00.

## 2. Visualisasi Data

Setelah dilakukan Analisis Data, hasilnya dilakukan Visualisasi Data menggunakan Microsoft Power BI.

**Nilai Temuan (Rp)**  
**5,149,286,308,229.24**

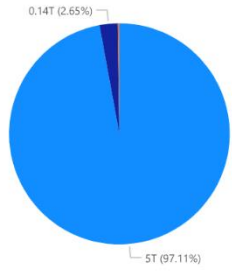
**Jumlah KKKS**  
**30**

**Jumlah Temuan**  
**458**

**Jumlah Kelompok Temuan**  
**7**

**DASHBOARD ANALISIS TEMUAN  
 HASIL PEMERIKSAAN BERSAMA  
 ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA  
 TAHUN 2021**

**Status Temuan**  
 ● Perlu Pembahasan Lebih Lanjut ● Setuju Sudah Dikoreksi ● Setuju Belum Koreksi



### **BAB III**

#### **Penutup**

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. *Dashboard* Analisis Temuan Hasil Pemeriksaan Bersama atas Pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Hulu Migas Tahun 2021 dapat membantu Satgas Pemeriksaan Bersama dalam mengembangkan ruang lingkup Pemeriksaan Bersama untuk memastikan kepatuhan pemenuhan kewajiban bagi hasil dan PPh Migas antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak Kerja Sama; dan
- b. Status temuan dapat menjadi pertimbangan Satgas Pemeriksaan Bersama dalam melakukan monitoring tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan Bersama atas KKKS yang diperiksa.